

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD
GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT
PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005**

(Studi Pada Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**BAHARUDDIN DALIMUNTJE
NPM : 04 840 0096
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : BAHARUDDIN DALIMUNTHE
NIM : 04 840 0096
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUOL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.72 TAHUN 2005
(Studi Pada Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : HJ. Rahmaniar, SH, M. Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

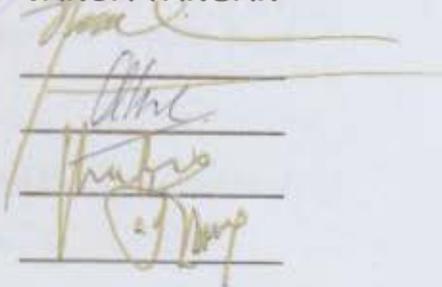
2. NAMA : HJ. Jamilah, SH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

TANDA TANGAN

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH.
3. PENGUJI I : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM
4. PENGUJI II : HJ. JAMILAH, SH, M.HUM



DISETUJUI OLEH:


**DEKAN
FAK. HUKUM-UMA**

**KETUA BIDANG HKM ADM. NEGARA
FAK. HUKUM-UMA**

(SYAFARUDDIN SH, M.HUM)

(ZAMZAMI, SH, MH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan ketapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005 (Studi Pada Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
- Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Ibu Hj. Jamilah, S.H. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

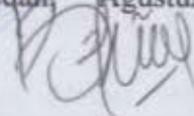
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terdingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari - hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2008



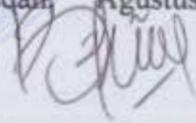
BAHARUDDIN DALIMUNTNE

- Ibu Hj. Jamiyah, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2008



BAHARUDDIN DALIMUNTJE

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005

(Studi Pada Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

OLEH
BAHARUDDIN DALIMUNTHE
NPM : 04 840 0096
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Dengan adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat desa sebagaimana diterangkan di atas perlu kiranya disikapi oleh berbagai pihak bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna mendorong agar proses transformasi di tingkat desa ini dapat berjalan dengan lebih cepat. Untuk itu diperlukan adanya proses-proses pendampingan, fasilitas dan sosialisasi terhadap semua instrumen hukum dalam berbagai level kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan tugas-tugas baru dan semangat baru inilah diharapkan desa akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang lebih demokratis, aspiratif dan accountable serta taat pada aturan yang berlaku.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peluang dan tantangan desa dalam penerapan prinsip *good governance* dan apakah hambatan bagi desa dalam penerapan prinsip *good governance*.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Setelah dilakukan analisis maka diketahui *good Governance* (tata pemerintahan yang baik) mempunyai makna yang lebih luas dari *government* (pemerintahan). Tata pemerintahan merupakan kesepakatan bersama dalam mengatur pemerintahan negara yang diatur bersama-sama dengan segenap komponen mulai dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan sektor swasta. *Good Governance* pada dasarnya adalah menjalankan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola permasalahan negara pada semua tingkatan. *Governance* memiliki tiga pijakan dan tiga kawasan. Ketiga pijakannya adalah pada bidang politik, ekonomi, dan administrasi, yang meliputi tiga kawasan yaitu negara atau pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004.....	10
A. Pengertian Umum tentang Desa.....	10
B. Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia	12
C. Pengaturan Tentang Desa.....	16
D. Desa Sebagai Bagian Dari Sistem Administrasi Negara.....	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK.....	25
A. Pengertian Pelayanan Publik.....	25

B. Pengertian Prinsip Good Governance.....	27
C. Prinsip-Prinsip Good Governance	37
BAB IV. PELUANG DAN TANTANGAN DESA DALAM	
MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.....	43
A. Gambaran Umum Desa Bandar Klippa.....	43
B. Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Tata	
Pemerintahan Desa	50
C. Pelayanan Publik Yang Diterapkan.....	56
D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Prinsip Good Governance	
di Desa Bandar Klippa.....	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis kelurahan, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat kelurahan mungkin merupakan wujud bangsa yang paling koogkret.

Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli, undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional.

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 2004, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah pula mencabut Undang-Undang No. 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas penibantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Dengan adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat desa sebagaimana diterangkan di atas perlu kiranya disikapi oleh berbagai pihak bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di dalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna mendorong agar proses transformasi di tingkat desa ini dapat berjalan dengan lebih cepat. Untuk itu diperlukan adanya proses-proses pendampingan, fasilitas dan sosialisasi terhadap semua instrumen hukum dalam berbagai level kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan tugas-tugas baru dan semangat baru inilah diharapkan desa akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang lebih demokratis, aspiratif dan accountable serta taat pada aturan yang berlaku.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul perlu kiranya diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah

“Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Tingkat Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Suatu adalah kata yang menunjukkan tunggal atau majemuk.¹
- Tinjauan artinya memandang, menilai.²
- Terhadap artinya bagi.³
- Penerapan diartikan sebagai sesuatu yang diterapkan.⁴
- Prinsip artinya dasar, pegangan.⁵
- *Good* artinya baik.⁶
- *Governance* artinya pemerintahan.⁷
- Di adalah kata yang menunjukkan tempat.⁸
- Tingkat adalah batas.⁹

¹Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 971.

²*Ibid.*, hal. 1003.

³*Ibid.*, hal. 775.

⁴*Ibid.*, hal. 1078.

⁵*Ibid.*, hal. 863.

⁶W.J.S. Poerwadarminta dan Bambang Sutarto, *Kamus Indonesia Inggris*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal. 103.

⁷*Ibid.*, hal. 112.

⁸Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 96.

⁹*Ibid.*, hal. 113.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Bagir Manan, *Good Governance Hindarkan Rakyat Dari Tindakan Negara Yang Merugikan*, Jurnal Transparansi, Edisi No. 14 November 1999, Jakarta.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- H.R. Sjahnan, *Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Otonomi Menurut Undang-undang 1945 di Indonesia*, Penerbit Monera, Cetakan kedua, 1996.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Inu Kencana Syafii, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPAN), *Desentralisasi, Pemerintahan Yang Baik dan Administrasi Kependudukan*, SFGG, Support Good Governance, Jakarta, 2004.
- Partnership For Governance Reform In Indonesia, *Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Medan, 2003.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Seleita Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Jakarta, 2003.
- Siagian, *Pokok-Pokok Pembangunan masyarakat Desa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

W.J.S. Poerwadarminta dan Bambang Sutarto, *Kamus Indonesia Inggris*, Erlangga, Jakarta, 1998.